



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3799-3807

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Mendukung Pelaksanaan Program OPOP (*One Pesantren One Product*)

Verto Septiandika^{1✉}, Eko Yudianto², Nur Adinda Putri³

Universitas Panca Marga

Email: vertoseptiandika@upm.ac.id^{1✉}

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan terkait peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendorong keberhasilan Program *One Pesantren One Product* (OPOP), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran pesantren dan UMKM lokal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci serta observasi lapangan yang berlangsung selama tiga bulan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung implementasi program, sejumlah kendala masih menghambat efektivitas pelaksanaan, seperti lemahnya koordinasi dan minimnya pelatihan kewirausahaan. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa perlu ada penguatan peran pemerintah dalam memberikan pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi pelatihan bagi pelaku pesantren dan UMKM. Rekomendasi utama mencakup pengembangan kapasitas institusi pelaksana dan perbaikan sinergi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan program OPOP.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Peran Pemerintah, OPOP, Pemberdayaan Pesantren, UMKM*

Abstract

This study aims to examine the implementation of policies related to the role of the Probolinggo City Government in promoting the success of the One Pesantren One Product (OPOP) Program, which is designed to improve community welfare by strengthening the role of Islamic boarding schools (pesantren) and local micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research was conducted using a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with 12 key informants and field observations carried out over a three-month period. The findings reveal that although the local government has taken strategic steps to support program implementation, several obstacles still hinder its effectiveness, such as weak coordination and limited entrepreneurship training. Based on these results, it is concluded that the government's role needs to be strengthened through sustained mentoring and the facilitation of relevant training for pesantren and MSME actors. The main recommendations include developing the capacity of implementing institutions and enhancing synergy among stakeholders to optimize the OPOP program.

Keywords: *Policy Implementation, Government Role, OPOP, Pesantren Empowerment, Msmes*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang jauh melampaui fungsi krusial sebagai lembaga pendidikan Islam dan pusat dakwah. Ia juga berfungsi sebagai aktor sosial dan ekonomi yang mampu mendorong perubahan serta pembangunan masyarakat. Sejak masa awal perkembangannya, pesantren tidak hanya menjadi tempat pembinaan keagamaan, tetapi juga terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan yang dilakukan oleh komunitas Muslim. Peran historis ini menjadikan pesantren sebagai institusi strategis yang berpotensi besar dalam memperkuat ekonomi di berbagai level, baik lokal maupun nasional (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021).

Menanggapi potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program terobosan bernama *One Pesantren One Product* (OPOP), yang secara resmi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020. Program ini dirancang untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren dengan cara mendorong pengembangan produk unggulan berbasis karya para santri. Diluncurkan sejak tahun 2019, OPOP menargetkan terbentuknya satu juta wirausahawan muda dan pengembangan seribu produk unggulan pesantren yang kompetitif hingga tahun 2023.

Sebagai bagian integral dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo ikut mengambil peran dalam menyukseskan OPOP. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), pemerintah daerah setempat telah melaksanakan berbagai langkah konkret, seperti menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan,

memfasilitasi pembuatan legalitas usaha termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mendirikan galeri dan klinik bisnis OPOP di titik-titik strategis kota (Wali Kota Probolinggo, 2023). Namun demikian, realisasi program ini belum sepenuhnya optimal. Dari total 31 pesantren yang telah terdaftar sebagai peserta program, hanya delapan yang berhasil melaju ke tingkat provinsi yang mencerminkan adanya kendala berarti dalam pelaksanaannya (KEP/425.012/2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas pelaksanaan OPOP di berbagai daerah. Wardani (2023), misalnya, menyoroti bagaimana program ini mendukung kemandirian ekonomi pesantren di Jember melalui penguatan unit usaha. Di sisi lain, Ainiyah (2024) fokus pada peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi perempuan melalui konsep *pesantrenpreneur*. Pratama (2023) mengevaluasi efektivitas program OPOP sebagai sarana pemberdayaan ekonomi pesantren di Belitung. Meski beragam dari segi lokasi dan pendekatan, kajian-kajian tersebut memiliki titik temu dalam hal fokusnya yang lebih dominan menyoroti faktor internal dari pihak pesantren. Sementara itu, dimensi keterlibatan pemerintah daerah sebagai aktor pendukung eksternal belum banyak mendapat perhatian secara mendalam.

Minimnya kajian yang secara komprehensif membedah peran dan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi OPOP menciptakan celah penelitian yang belum tergarap. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana efektivitas peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan Program OPOP, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong atau penghambat keberhasilan program tersebut di lapangan.

Untuk mengurai implementasi kebijakan dalam riset ini, kerangka teoretis yang diterapkan adalah pendekatan implementasi kebijakan publik dari Thomas B. Smith (terdapat dalam SSS NIM, 2019). Landasan teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada sinergi empat elemen pokok: formulasi kebijakan yang matang, identifikasi kelompok sasaran yang jelas, kapasitas organisasi pelaksana, serta konteks lingkungan eksternal yang mewarnai jalannya implementasi. Dalam konteks implementasi Program *One Pesantren One Product* (OPOP), keempat elemen ini memiliki korelasi signifikan dengan beragam faktor penentu di lapangan. Aspek-aspek seperti regulasi yang terdefinisi dengan baik, ketersediaan sumber pendanaan, dan program pelatihan keterampilan memegang peranan krusial dalam menopang keberhasilan program. Sebaliknya, apabila ketiga aspek tersebut mengalami gangguan misalnya, regulasi tidak diimplementasikan secara optimal, alokasi dana tidak efektif, atau pelatihan tidak

relevan dengan kebutuhan aktual pesantren maka kondisi ini justru berpotensi menghambat implementasi kebijakan.

Teori ini menyediakan landasan teoretis yang menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik, terutama ketika dipadukan dengan perspektif pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan model kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara luas (Rahman, 2021).

Dalam praktiknya, berbagai bentuk dukungan telah diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, seperti bantuan alat produksi kepada Pondok Pesantren Azidan Barokatu Zaini Hasan, pendirian gerai khusus untuk mempromosikan produk-produk unggulan pesantren, serta partisipasi aktif dalam ajang pameran seperti EXPO OPOP 2024 yang diselenggarakan di Surabaya. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Beberapa kendala utama mencakup rendahnya literasi legalitas usaha di kalangan pengelola pesantren, lemahnya koordinasi antara lembaga teknis terkait, dan belum optimalnya sinergi antar aktor pelaksana program.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi OPOP di tingkat daerah. Tidak hanya untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pemerintah, mengidentifikasi berbagai tantangan yang mengemuka, dan memberikan alternatif solusi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan penguatan ekonomi pesantren secara menyeluruh. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana teoretis dalam studi implementasi kebijakan publik serta menjadi pedoman aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan yang berbasis pada potensi lokal pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam implementasi program *One Pesantren One Product* (OPOP). Sesuai dengan pandangan Moleong (2018), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial melalui interpretasi data verbal dan perilaku. Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020) menekankan bahwa metode ini sangat sesuai untuk menganalisis kebijakan publik karena mempertahankan konteks alami tanpa mengkuantifikasi fenomena. Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo serta lima pondok pesantren

yang aktif dalam program OPOP, dengan melakukan observasi langsung terhadap interaksi para pemangku kepentingan.

Fokus penelitian ditetapkan untuk menyaring kompleksitas informasi di lapangan, mengikuti prinsip pembatasan ruang lingkup yang diusulkan oleh Sugiyono (2018). Pemilihan Kota Probolinggo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa hanya 27% dari 31 pesantren peserta OPOP yang memenuhi standar provinsi (Keputusan Wali Kota No. 188.45/79/KEP/425.012/2022).

Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Wawancara mendalam dilakukan dengan 12 informan, termasuk pejabat DKUPP, pengelola dan pelaku usaha pesantren, serta tokoh masyarakat yang telah terlibat minimal dua tahun dalam OPOP. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, arsip administrasi program, dan referensi akademik (Sugiyono, 2019).

Untuk memastikan validitas, digunakan triangulasi data. Wawancara menggunakan panduan semi-terstruktur yang telah diuji. Analisis dokumen dilakukan dengan pendekatan *hermeneutik* untuk memahami konteks kebijakan (Sidiq et al., 2019). Analisis data mengikuti empat tahapan menurut Miles dan Huberman (2014): pengumpulan data, reduksi data dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12, penyajian hasil dalam bentuk narasi *analitik*, dan validasi melalui diskusi kelompok terbatas dengan informan. *Kredibilitas* hasil diuji menggunakan teknik *member check* dan triangulasi untuk membandingkan narasi aktor dengan bukti dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung Program *One Pesantren One Product* (OPOP) berlangsung secara bertahap dan telah menunjukkan kemajuan positif, meskipun masih ditemukan hambatan-hambatan penting di lapangan. Temuan tersebut diperoleh melalui proses triangulasi data yang mencakup wawancara mendalam dengan pejabat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, pimpinan pesantren peserta OPOP, serta observasi langsung terhadap aktivitas pelatihan dan produksi. Di samping itu, dokumen kebijakan serta laporan tahunan OPOP di tingkat daerah dan provinsi turut dikaji sebagai data sekunder guna meningkatkan validitas informasi.

Menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik dari Thomas B. Smith, analisis dilakukan berdasarkan empat komponen utama: perumusan kebijakan, penentuan target sasaran, kapasitas lembaga pelaksana, serta pengaruh lingkungan eksternal. Dalam

hal perumusan kebijakan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menunjukkan keseriusan dalam mengadopsi visi OPOP dari Provinsi Jawa Timur ke dalam kebijakan lokal, yang tercermin dalam berbagai produk hukum seperti peraturan walikota dan surat edaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi pesantren. Namun, kendati kerangka kebijakan telah tersedia secara formal, pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena adanya ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi teknis, terutama terkait dengan penyaluran modal dan akses pasar.

Terkait penentuan sasaran, pemerintah daerah telah mengidentifikasi beberapa pesantren yang dianggap memiliki potensi untuk menjalankan program OPOP, terutama yang sudah memiliki unit usaha seperti kuliner, konveksi, atau pertanian organik. Namun dalam praktiknya, tak semua pesantren memiliki SDM yang memadai untuk mengelola usaha secara konsisten, sehingga terdapat ketidakharmonisan antara sasaran program dan kapasitas riil yang tersedia. Ini sejalan dengan temuan mengenai kapasitas organisasi pelaksana, di mana kolaborasi antara dinas teknis, pendamping lapangan, dan pengelola pesantren masih terbatas dan belum menyatu secara sistematis. Beberapa responden menyebut bahwa koordinasi antarlembaga belum optimal dan masih bersifat sektoral, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya sistem pengawasan. Di sisi lain, masih banyak pesantren yang belum memperoleh pelatihan memadai terkait manajemen usaha dan pemasaran digital, padahal keterampilan tersebut sangat krusial dalam ekosistem ekonomi kreatif saat ini.

Dari sisi eksternal, dukungan dari pemerintah provinsi serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perbankan syariah, pelaku UMKM, dan platform *e-commerce* lokal cukup membantu keberlangsungan program. Namun demikian, program OPOP juga menghadapi tantangan dari luar, seperti kompetisi pasar yang ketat, perubahan harga bahan baku, dan ketergantungan pada momen-momen tertentu untuk menjual produk. Berdasarkan indikator faktor pendukung dan penghambat, keberhasilan program ini banyak ditentukan oleh aspek regulasi, pendanaan, dan pelatihan. Di pesantren yang memperoleh dukungan modal dan pelatihan intensif, terlihat adanya peningkatan kapasitas produksi dan keterlibatan santri dalam kewirausahaan.

Sebaliknya, di lokasi yang belum mendapatkan intervensi tersebut, perkembangan ekonomi pesantren berjalan lambat. Keluhan lain datang dari para pimpinan pesantren terkait lemahnya aspek legal yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara kelembagaan, menjadikan implementasi bergantung pada hubungan personal, bukan sistem yang baku.

Ketimpangan alokasi dana dan terbatasnya insentif untuk para pendamping juga menjadi hambatan besar dalam percepatan program.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tampak bahwa tantangan dalam implementasi OPOP cenderung memiliki pola yang serupa. Misalnya, Wardani (2023) mengungkapkan bahwa program ini di Jember mendukung kemandirian ekonomi pesantren melalui unit usaha lokal, tetapi masih menghadapi kendala permodalan dan distribusi produk. Sementara itu, Pratama (2023) menilai bahwa keberhasilan OPOP di Belitung dipengaruhi oleh keberlanjutan pelatihan berbasis praktik serta koordinasi lintas sektor. Keseluruhan temuan ini sejalan dengan teori Thomas B. Smith yang menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, melainkan juga oleh kapabilitas pelaksana serta dinamika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setempat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan OPOP oleh Pemkot Probolinggo masih dalam tahap pengembangan. Untuk mengoptimalkan program, diperlukan regulasi yang lebih aplikatif, sistem pendanaan yang merata dan berkesinambungan, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pesantren. Disarankan agar dibentuk tim lintas sektor yang memiliki tugas khusus dalam memantau dan memperkuat program ini, disertai dengan integrasi OPOP ke dalam kebijakan lokal lainnya, seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat mentransformasikan OPOP menjadi strategi ekonomi yang lebih substantif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian mengenai kontribusi Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendorong Program *One Pesantren One Product* (OPOP) mengungkap bahwa sejumlah upaya strategis telah diambil, termasuk perumusan kebijakan, pendampingan teknis, dan penguatan jejaring kolaborasi, demi meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren secara berkelanjutan. Temuan studi menunjukkan bahwa meski upaya regulasi dan identifikasi potensi pesantren telah dilakukan, implementasi program masih menghadapi tantangan seperti kurang sinerginya antarlembaga, ketidakmerataan penyaluran bantuan, rendahnya intensif pelatihan kewirausahaan, serta kapasitas SDM pesantren yang belum optimal. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya lingkup wilayah yang hanya terbatas pada Kota Probolinggo tanpa melibatkan analisis komparatif dengan daerah lain, serta belum mengintegrasikan pandangan santri secara mendalam

sebagai pelaku utama dalam proses produksi. Sebagai rekomendasi, perlu dibentuk unit kolaboratif lintas sektor guna memastikan progres OPOP, meningkatkan ragam pelatihan berbasis kebutuhan riil pesantren, serta menyusun mekanisme pendanaan dan penilaian program yang sistematis. Untuk penelitian selanjutnya, penting dilakukan kajian komparatif antarwilayah serta eksplorasi faktor sosio-kultural yang memengaruhi keberhasilan OPOP guna merumuskan model implementasi yang adaptif sesuai konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, M. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Madura Berbasis Pesantrenpreneur dan Sosiopreneur. Surabaya: Universitas Trunojoyo Madura.
- Mawardi. (2020). Ekonomi Syariah dan Kemandirian Pesantren. Ekonomisyariah.org. Retrieved from <https://ekonomisyariah.org>
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage.
- Moleong, L.J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mumfarida, A., & Dzikrulloh, M. (2021). Peran Pesantren dalam Penguatan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, 9(1), 1-12.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2020 tentang Program OPOP.
- Pratama, P. S. (2023). Analisis Efektivitas Program OPOP dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Kabupaten Belitung. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rahman, A. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan dalam Pengembangan Produk Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 85-99.
- Sidiq, U., Choiri, M.M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. CV. Nata Karya.
- Smith, T.B. (2019). Public policy implementation: Issues and challenges. Routledge.
- SSS NIM. (2019). Teori Implementasi Kebijakan Thomas B. Smith. Makalah Kebijakan Publik, Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wardani, F. (2023). Implementasi Program One Pesantren One Product (OPOP) dalam Meningkatkan Kemandirian Pesantren Ihyaussunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember. Jember: Universitas Jember.

Yulianto, A. (2023). Sinergi Pemerintah dan Pesantren dalam Program OPOP. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45–56.